

***Framing* pada Media Daring Kompas.com dan Tempo.co terhadap Pemberitaan Isu Konsorsium 303 Kasus Ferdy Sambo**

Sheren Adinda¹, Suzy Azeharie^{2*}

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: sheren.915190044@stu.untar.ac.id

²Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta*
Email: suzya@fikom.untar.ac.id

Masuk tanggal: 09-12-2022, revisi tanggal: 07-01-2023, diterima untuk diterbitkan tanggal: 05-02-2023

Abstract

Online media is a part of online journalistic products in the form of reporting facts or events that are spread via the internet. This research is to find out the framing carried out by Kompas.com and Tempo.co to see the implementation of the journalistic code of ethics in making news and to find solutions to restore the public's trust to the police. Reporting on the issue of the 303 consortiums in the Ferdy Sambo case. Qualitative research methodology was conducted to collect data obtained through interviews, observations and other information obtained using literature. The analytical method used is the framing analysis method from Robert N. Entman. Several matters related to the two online media support the Indonesian National Police in thoroughly investigating the 303-consortium issue and presenting experts and the police as sources to balance the news. A journalist can serve the right of reply and the right of correction proportionally in accordance with the journalistic code of ethics and high police officer must be brave, committed and firm in taking risks against police officers that broken the rules.

Keywords: *Ferdy Sambo, framing, issue, online media, police*

Abstrak

Media daring merupakan bagian dari produk jurnalistik daring yang berbentuk pelaporan fakta atau peristiwa yang disebarakan melalui internet. Penelitian ini untuk mengetahui *framing* yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co untuk melihat implementasi kode etik jurnalistik dalam membuat berita dan juga mencari tahu solusi dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada pihak kepolisian. Pemberitaan mengenai isu konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo. Metodologi penelitian kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang didapat melalui wawancara, observasi serta informasi lain yang didapat dengan menggunakan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis *framing* dari model Robert N. Entman. Beberapa hal terkait kedua media daring mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengusut tuntas isu konsorsium 303 dan menampilkan pakar maupun pihak kepolisian sebagai narasumber untuk membuat berita menjadi seimbang. Seorang wartawan dapat melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional sesuai dengan kode etik jurnalistik dan para pejabat tinggi kepolisian harus berani, berkomitmen dan tegas dalam mengambil resiko terhadap oknum polisi.

Kata Kunci: Ferdy Sambo, isu, media daring, pembungkahan, polisi

1. Pendahuluan

Komunikasi memiliki peran penting dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal ini komunikasi massa. Komunikasi massa menggunakan media massa untuk menyampaikan informasi secara luas, anonim dan heterogen (Hadi, Wahjudianata, & Indrayani, 2021). Ardianto dalam Romli menggambarkan proses komunikasi massa sebagai umpan balik dari khalayak kepada komunikator sehingga menimbulkan berbagai reaksi dari khalayak massa (Romli, 2016).

Media massa dalam menyalurkan pesan berdampak pada opini khalayak sehingga dituntut untuk lebih cermat dalam memberikan informasi secara benar (Putra, 2015). Dalam meliput berita media hanya memberitakan sesuai dengan perspektif yang dimilikinya. Berita yang ditampilkan dianggap penting oleh khalayak sebagai penentu kebenaran informasi ke dalam pengaturan agenda (Hadi, Wahjudianata, & Indrayani, 2021). Teori pengaturan agenda mengkaji media dari dua sisi yaitu melihat kekuatan dari media dan kebebasan khalayak dalam memilih suatu hal. Kebutuhan orientasi, indeks rasa keingintahuan yang tinggi dan ketidakpastian membuat penonton terpaku pada satu media untuk mendapatkan informasi (Romli, 2016).

Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat telah membuka isu kejahatan lain yang melibatkan Ferdy Sambo, yaitu skema infografis konsorsium 303 dalam memperlancar transaksi aliran dana dan melancarkan operasional. Berbagai portal berita turut menyoroti sekaligus menyajikan berita terkait dugaan aksi kejahatan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsorsium memiliki tiga arti yang berbeda, yaitu kelompok pengusaha, kelompok pedagang, atau persekutuan dalam melakukan bisnis. Konsorsium juga dapat diartikan sebagai pembiayaan bersama, proyek, atau usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih bank maupun lembaga keuangan. Sedangkan, angka 303 menunjuk Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana perjudian (Purnama, 25 Agustus 2022).

Kasus Ferdy Sambo menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian menurun, survei dari Charta Politika Indonesia menunjukkan angka kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia menyentuh 56 persen (Wahid, 21 Oktober 2022). Sebelumnya, pada bulan Juni lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian sempat menyentuh angka 73 persen. Penurunan angka kepercayaan publik terhadap kepolisian menurun drastis dan termasuk dalam kategori rapor merah (Helmi, 22 September 2022).

Analisis *framing* merupakan seleksi realitas yang membentuk realitas tertentu menjadi titik pusat perhatian dalam teks berita dengan menekankan definisi dari sebuah peristiwa, penyebab peristiwa, membuat keputusan dan merekomendasikan solusi tertentu (Eriyanto, 2018). Scheufele dan Scheufele dalam Eriyanto berpendapat bahwa *framing* dapat mempengaruhi khalayak dalam berpikir mengenai suatu isu dengan cara dipahami dan ditafsirkan (Eriyanto, 2018). Wartawan wajib menjelaskan peristiwa sebenarnya agar khalayak dapat memahami dan menafsirkan secara mandiri. *Framing* dapat menentukan pandangan, sikap, dan perilaku seseorang (Eriyanto, 2015: 47).

Wartawan menjadi pihak bertanggung jawab yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik, termasuk dalam melakukan penyebaran informasi sehingga wartawan di Indonesia harus berpegang teguh terhadap kode etik jurnalistik untuk mempertahankan moral dan etika profesi sekaligus menjadikan kode etik jurnalistik

sebagai pedoman operasional untuk menjaga kepercayaan publik dan meneguhkan integritas (Ayurani, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih media daring Kompas.com dan Tempo.co sebagai bagian dari media daring yang menyajikan berita mengenai isu konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo, karena relatif menampilkan berita yang dapat dipertanggungjawabkan dan perkembangan berita terkini. Peneliti ingin memahami, melakukan analisis, membandingkan, dan melihat kedua media daring tersebut melakukan pemberitaan isu konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo serta ingin melihat implementasi kode etik jurnalistik. Analisis dilakukan dengan metode analisis *framing* Robert N. Entman. Kemudian, peneliti juga ingin menemukan solusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Johnny Saldana menganggap metode kualitatif sebagai “payung” untuk berbagai macam metode penelitian faktual dalam kehidupan sosial (dalam Sugiyono, 2020). Sedangkan studi kasus merupakan penelitian yang menyelidiki suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara jelas sehingga memanfaatkan multisumber (Yin, 2013). Proses dalam melakukan penelitian dilakukan secara eksploratif dan memahami makna suatu perilaku individu maupun kelompok, kemudian menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan (Sugiyono, 2020).

Subjek penelitian ini adalah Kompas.com dan Tempo.co, sedangkan objek penelitian ini adalah isu pemberitaan isu konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan melalui media daring Kompas.com dan Tempo.co pada periode Agustus sampai Oktober 2022 dan melakukan wawancara dengan seorang pensiunan polisi berpangkat Inspektur Jenderal sekaligus dosen dari Lembaga Ketahanan Nasional melalui Zoom pada tanggal 1 November 2022.

Teknik pengumpulan data mencakup penelusuran data siber, observasi secara non partisipan, studi kepustakaan, dan wawancara, kemudian teknik analisis data. Selanjutnya, teknik analisis data yang dilakukan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga memakai teknik keabsahan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang handal.

3. Hasil Temuan dan Pembahasan

Framing Pemberitaan Kompas.com

Peneliti memilih masing-masing dari empat artikel dari Kompas.com dari tanggal 19 Agustus 2022 sampai 26 September 2022.

Tabel 1. Berita Kompas.com

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit
1.	Marwah Jadi Taruhan, Polri Didorong Usut Tuntas Isu “Bekingan” Bisnis Judi Ferdy Sambo	19 Agustus 2022
2.	Kapolri Perintahkan Divisi Propam Dalami Isu Konsorsium 303	24 Agustus 2022

-
3. Jet Pribadi yang Diduga Dipakai Brigjen Hendra Disebut Milik Bandar Judi, Terdaftar di San Marino 22 September 2022
 4. IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi 26 September 2022
-

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori analisis *framing* Robert N. Entman didapati bahwa Kompas.com bersikap mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengusut tuntas isu konsorsium 303. Hal tersebut dikarenakan adanya berita yang ditampilkan oleh Kompas.com mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ferdy Sambo jika terbukti bersalah.

Di samping itu, jurnalis dari Kompas.com tidak memberikan opini. Hal tersebut dikarenakan wartawan harus memberitakan berita sesuai fakta dan Kompas.com menggunakan narasumber yang kredibel. Selain menggunakan sudut pandang dari berbagai narasumber. Kompas.com turut menggunakan narasumber yang berasal dari pihak kepolisian yang membuat berita tersebut menjadi seimbang, namun yang harus menjadi pusat perhatian adalah mengenai validitas data yang ditampilkan oleh Kompas.com.

***Framing* Pemberitaan Tempo.co**

Peneliti memilih masing-masing dari 4 artikel dari Tempo.co dari tanggal 19 Agustus 2022 sampai 22 September 2022.

Tabel 2. Berita Tempo.co

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit
1.	Pakar Pidana Sebut Instruksi Kapolri Berantas Judi Mengindikasikan Netralisir Isu Konsorsium 303	19 Agustus 2022
2.	Soal Konsorsium 303 Ferdy Sambo, Kapolri: Sedang Kami Dalami	24 Agustus 2022
3.	Soal Konsorsium 303 Ferdy Sambo, IPW Siap Hadapi Laporan Robert Priantono Bonosusatya	21 September 2022
4.	Konsorsium 303 Ferdy Sambo Disebut Terkait dengan Jaringan Perdagangan Orang	22 September 2022

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori analisis *framing* Robert N. Entman didapati bahwa Tempo.co bahwa Tempo.co mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengusut tuntas isu konsorsium 303. Selain itu ada beberapa berita perlu diperiksa kredibilitas sehingga menjadi kewajiban bagi wartawan Tempo.co untuk memilih berita yang sesuai dengan fakta dan tidak membuat masyarakat tidak menanyakan kebenaran dari berita tersebut. Namun, pemberitaan Tempo.co masih menggunakan pakar yang kredibel walaupun ada kesamaan pakar dengan Kompas.com.

Hasil penelitian *framing* Robert N. Entman di atas dapat dikonfirmasi bahwa kedua media tersebut memiliki kecenderungan dalam melakukan penyeleksian informasi maupun penonjolan pada aspek tertentu. Dalam melakukan penyeleksian informasi yang berkaitan dengan pemilihan fakta yang dilakukan wartawan, seharusnya tidak seluruh aspek dari sebuah isu perlu ditampilkan.

Sedangkan penonjolan yang dimaksud adalah proses dalam pembuatan informasi menjadi bermakna dan menarik serta lebih diingat oleh khalayak pembaca. Masing-masing pihak mengedepankan perspektif, sudut pandang, dan opini tertentu untuk dapat menarik dukungan publik (Eriyanto, 2015).

Meninjau media daring Kompas.com dan Tempo.co menampilkan berita dengan komposisi narasumber, mulai dari penyantuman opini dari narasumber yang berasal dari Ketua *Indonesia Police Watch* yang berperan sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepolisian, yaitu Sugeng Teguh Santoso. Judul yang dimuat dengan menyantumkan *Indonesia Police Watch* juga menarik perhatian masyarakat, mengingat bahwa kasus konsorsium 303 yang melibatkan Ferdy Sambo masih berupa isu yang belum dibuktikan hingga saat ini. Sehingga menciptakan khalayak tidak diberikan peluang yang cukup untuk mendapatkan informasi secara objektif sehingga khalayak kurang mampu membentuk struktur pemahaman yang beragam atas suatu isu (Eriyanto, 2015).

Keputusan atau kecenderungan media disebabkan oleh sumber elit yang diwawancarai dan memberikan dampak berupa dukungan atau penentangan (Eriyanto, 2015). Dalam analisis *framing* Robert N. Entman, dapat dilihat bahwa media daring Kompas.com dan Tempo.co sama-sama menyantumkan kebijakan yang dibuat oleh kepolisian, hal ini juga menandakan bahwa kedua media sama-sama memberikan dukungan terhadap terealisasinya janji yang diutarakan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan menampilkan berita ini, masyarakat dapat mendukung kebijakan dan janji dari pihak kepolisian agar kebuktian dapat terwujud.

Melihat dari artikel keseluruhan berita terkait konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo yang ditampilkan oleh media daring Kompas.com dan Tempo.co masih berupa isu, maka hak jawab dan hak koreksi secara proporsional perlu diimplementasikan. Sesuai dengan kode etik jurnalistik dari Aliansi Jurnalis Independen nomor 12 bertuliskan bahwa jurnalis melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional dan kode etik jurnalistik dari Aliansi Jurnalis Independen nomor 11 bahwa seorang jurnalis harus segera mengoreksi atau mencabut berita jika dianggap keliru dan tidak akurat lalu disertai dengan permintaan maaf kepada publik (Aliansi Jurnalis Independen, 2021).

Jika terdapat hal keliru di dalam suatu pemberitaan, maka seseorang berhak untuk menegur dan memberitahu dengan cara yang baik dan tidak melayangkan somasi berisi ancaman dan mengarah kepada tindakan hukum secara tiba-tiba kepada wartawan maupun media massa. Jika berita yang ditampilkan dianggap keliru, maka orang tersebut hanya perlu untuk menjawab dan meluruskan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Sudut pandang antara wartawan, aktor dalam artikel berita, maupun khalayak pasti berbeda. Wartawan berhak untuk menulis sesuai dengan yang sesuatu hal yang didapatkan, dilihat, dan terjadi di dalam lapangan, sehingga wartawan memuat berita sesuai dengan persepsi yang dimilikinya. Hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik. Wartawan juga memiliki hak untuk menjawab selama masih memiliki data pendukung yang relevan (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Dalam hal berita yang ditampilkan oleh media terkait dengan isu konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo menjadikan isu ini sebagai sorotan paling kontroversial. Isu konsorsium 303 pun awal mulanya tersebar luas melalui internet, yakni media

sosial *twitter*. Seperti pepatah “*Tidak akan ada asap jika tidak ada api*” (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Tidak akan ada yang namanya akibat jika tanpa diketahui penyebab dari suatu masalah. Kemunculan isu konsorsium 303 di media sosial tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada penyebab. Validitas data yang ditampilkan dalam diagram konsorsium 303 patut dipertanyakan sumber informasinya. Berbagai media turut menampilkan berbagai topik berita terkait konsorsium 303. Media sosial mendapatkan sumber data dengan cara masing-masing, menurut versi yang didapatkan dan sesuai dengan sesuatu yang dialami tersebut (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Sebagian masyarakat menilai setiap informasi yang disampaikan oleh media massa tidak menunjukkan kesamaan maupun senada, bahkan cenderung bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan opini negatif (Elfrida, 2015). Melihat dari berita yang telah dianalisis dengan menggunakan kerangka metode *framing* dari Robert N. Entman. Terdapat perbedaan topik berita yang dibuat, yaitu pada media daring Kompas.com yang memberitakan laporan aliran keuangan konsorsium 303. Sedangkan Tempo.co memberitakan keterkaitan konsorsium 303 dengan jaringan perdagangan manusia di Kamboja.

Wartawan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan data diagram konsorsium 303 melalui karyawan yang turut terlibat di dalam konsorsium 303. Karyawan konsorsium 303 dinilai belum tentu memiliki satu visi dan misi yang sama dengan bos konsorsium, tetapi terkait validitas data perlu dibuktikan dan melihat perkembangan kebenaran isu tersebut (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Terkait dengan konsorsium 303 keterlibatan Ferdy Sambo dalam konsorsium 303, menimbulkan kontroversial, mengingat tugas yang dilalui Ferdy Sambo saat masih menjabat di dalam institusi kepolisian. Dana operasional Satuan Tugas Khusus Merah Putih untuk memindahkan jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dari Jakarta ke Jambi menghabiskan biaya hingga Rp 350 juta (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Melihat dari gaji yang didapatkan oleh Ferdy Sambo selama bekerja di dalam institusi kepolisian, Ferdy Sambo berhak menerima gaji paling kecil sebanyak Rp31.375.500 dan paling besar sebanyak Rp36.952.000 dalam satu bulan (Idris, 10 Agustus 2022). Untuk mendapatkan harta kekayaan yang melimpah, maka menjadi seorang polisi merupakan cara yang salah. Tugas polisi adalah mencari tahu sesuatu yang salah maupun yang benar, serta mencari cara agar sebuah negara menjadi aman, maju, dan tertib (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Pasca terungkapnya berbagai fakta maupun isu dari kasus konsorsium 303 yang dilakukan oleh Ferdy Sambo memberikan dampak buruk terhadap penurunan kepercayaan publik dan citra buruk kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga 56 persen berdasarkan survei yang dilakukan oleh Charta Politika Indonesia (Wahid, 21 Oktober 2022).

Hal tersebut dinilai wajar oleh Irjen. Pol. (Purn.) Mardijto apabila masyarakat merasakan kekecewaan terhadap institusi kepolisian. Ia menilai bahwa masyarakat sudah tidak mempercayai kepolisian adalah berdasarkan pada pengalaman yang dialami dan dirasakan langsung di lapangan. Bahwa ia melihat keraguan yang

dirasakan oleh anggota kepolisian khususnya di Kota Makassar. Keraguan ini membuat para anggota kepolisian bingung dan takut merasa salah untuk melangkah (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Solusi yang harus menjadi perhatian institusi kepolisian dengan fokus memperbaiki dari sisi internal kepolisian, yaitu dengan melakukan reformasi budaya militer menjadi budaya sipil pada setiap anggota kepolisian. Para pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas, berani mengambil resiko dan berkomitmen untuk bersikap tegas terhadap oknum-oknum polisi yang telah menyimpang dengan melakukan pemecatan terhadap oknum anggota kepolisian (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Dewan Kebijaksanaan dalam menentukan calon pemimpin harus mengikuti peraturan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, yaitu melaksanakan rapat untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu dalam mencari tahu informasi terkait calon pemimpin, apakah calon pemimpin belum berkompeten untuk menjadi pemimpin, jika tidak maka Dewan Kebijaksanaan berhak menolak orang tersebut (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Budaya pamer kemewahan dinilai sebagai kesalahan fatal dan sudah melanggar aturan, terlebih jika harta tersebut didapatkan dengan cara tidak benar. Menurut dengan Irjen. Pol. (Purn.) Mardjito, sebaiknya harta-harta yang dimiliki oleh seorang oknum polisi didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka harta tersebut layak disita. Hasil dari harta yang disita dan diberikan kepada negara (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

Seluruh solusi yang telah ditawarkan tentunya membutuhkan aksi nyata yang dilakukan oleh kepolisian dan dukungan dari masyarakat maupun lembaga institusi di dalam pemerintahan. Pihak dari kepolisian harus segera menangani dan membuktikan segala kasus yang tengah menjadi perbincangan masyarakat.

Selanjutnya, melakukan pembersihan yang terdapat di dalam internal kepolisian dan melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian dengan benar agar masyarakat bisa kembali mempercayai polisi. Hal tersebut dikarenakan bahwa dukungan penuh dari masyarakat dan lembaga pemerintah juga menjadi faktor paling terpenting dalam mewujudkan kembali kepercayaan masyarakat (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

4. Simpulan

Media daring Kompas.com dan Tempo.co menampilkan pakar maupun pihak kepolisian sebagai narasumber guna untuk membuat berita menjadi lebih seimbang. Kedua media daring sama-sama menampilkan informasi terkait kebijakan kepolisian terhadap isu konsorsium 303 sehingga masyarakat diharapkan dapat mendukung kebijakan tersebut dapat terealisasikan.

Berita terkait isu konsorsium 303 tentunya menimbulkan perbedaan sudut pandang dan perbedaan tafsiran bagi masyarakat yang membaca berita tersebut. Selain itu, media massa menampilkan berita yang membuat kebanyakan masyarakat

memperceyai informasi tersebut sehingga menjadikannya sebagai suatu kebenaran terhadap rujukan suatu informasi.

Oleh karena itu, wartawan dan media massa dalam melakukan peliputan berita seharusnya turut menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman untuk menjaga kredibilitas dan mengutamakan akurasi. Sesuai dengan kode etik jurnalistik dari Aliansi Jurnalis Independen nomor 12 yang tertulis bahwa seorang jurnalis melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Selain itu, kode etik jurnalistik dari Aliansi Jurnalis Independen nomor 11 juga harus diimplementasikan, yaitu seorang jurnalis harus segera mengoreksi atau mencabut berita jika berita tersebut dianggap keliru maupun tidak akurat tentunya wartawan juga harus segera melakukan permintaan maaf kepada publik.

Kemunculan isu konsorsium 303 di media sosial tidak akan terjadi jika tanpa sebab. Lalu, media sosial maupun wartawan bisa mendapatkan sumber data dengan cara masing-masing. Namun dalam melampirkan sebuah data, seharusnya validitas data tersebut perlu dibuktikan dan melihat perkembangan kebenaran isu tersebut. Sehingga validitas data dari diagram konsorsium 303 dapat dipertanyakan sumber informasinya.

Kemudian, para pejabat tinggi di kepolisian harus berani dan berkomitmen dalam mengambil resiko maupun bersikap tegas terhadap oknum polisi yang telah menyimpang, yaitu dengan melakukan pemecatan terhadap anggota oknum kepolisian. Budaya pamer di dalam kepolisian dinilai dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan sudah melanggar aturan, terlebih jika harta tersebut didapatkan dengan cara tidak benar sehingga harta-harta yang didapatkan dengan tidak benar layak disita dan diberikan kepada negara.

Dukungan penuh dari masyarakat dan lembaga pemerintah menjadi faktor penting, sehingga masyarakat maupun lembaga pemerintah diharapkan untuk tidak hanya membicarakan hal-hal buruk terkait kepolisian, melainkan turut mendukung segala bentuk usaha yang telah maupun yang masih diupayakan oleh institusi kepolisian.

5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, serta semua pihak yang turut serta membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

6. Daftar Pustaka

- Aliansi Jurnalis Independen. (2021). *Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)*. Aliansi Jurnalis Independen, 75. Retrieved from <https://aji.or.id/read/kode-etik.html> diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 13:50 WIB.
- Ayurani, S. C. (2021). *Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas Dan Independensi Wartawan*. Res Publica Vol. 5 No. 2, Mei-Ags 2021, 5(2), 127–140.
- Elfrida, S. V. (2015). *Proses Membangun Agenda Setting Kebijakan Pada Portal Berita Pemerintah Dan Kesesuaiannya Dengan Agenda Media Online*. Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, 6(1), 13–26.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Group.

- Eriyanto. (2018). *Media dan Opini Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2021). *Komunikasi Massa*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Helmi, I. (2022, September 22). *Survei Charta Politika Sebut Kepercayaan Publik ke Polri Anjlok ke 55 Persen: Dapat Rapor Merah*. Kompas.TV. Retrieved from <https://www.kompas.tv/article/330994/survei-charta-politika-sebut-kepercayaan-publik-ke-polri-anjlok-ke-55-persen-dapat-rapor-merah> diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 22:40 WIB.
- Idris, M. (2022). *Irjen Ferdy Sambo Terima Gaji Besar, Berapa Total Per Bulan?* Kompas.com. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2022/08/10/120220626/irjen-ferdy-sambo-terima-gaji-besar-berapa-total-per-bulan?page=all> diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 15:00 WIB.
- Purnama, K. I. (2022). *Dugaan Jaringan Judi Online dalam Kasus Ferdy Sambo, Apa Itu Konsorsium 303?* Tempo.co. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1626650/dugaan-jaringan-judi-online-dalam-kasus-ferdy-sambo-apa-itu-konsorsium-303> diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 11:43 WIB.
- Putra, V. P. (2015). *Pembingkaihan Berita Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi atas Kritik Media Massa di Media Online Sindonews.com dan vivanews.co.id Edisi Agustus 2015)*. Universitas Islam Indonesia.
- Romli, K. (2016). *Komunikasi Massa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, H. (2022). *Merindukan Polri Kembali ke Fitrahnya*. Kompas.com. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/21/151408865/merindukan-polri-kembali-ke-fitrahnya?page=all> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 10:35 WIB.
- Yin, R. K. (2013). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Bandung: PT Raja Grafindo.